

IMPLEMENTASI E-DEMOCRACY PADA TINGKAT PROGRAM STUDI: TRANSFORMASI PRAKTIK DEMOKRASI MAHASISWA DALAM PEMILIHAN HMPS PGSD DI UNIVERSITAS NIAS

Eka Periaman Zai¹, Indah Wijaya Lase²

^{1, 2}Universitas Nias, Jalan Pancasila No. 10, Kota Gunungsitoli-Sumatera Utara, Indonesia
Email: ekaperiamanzai@unias.ac.id

Article History

Received: 02-02-2026

Revision: 12-02-2026

Accepted: 15-02-2026

Published: 17-02-2026

Abstract. This study aims to analyze the implementation of e-democracy and the quality of student participation in the election of the Head of the Student Association of the Elementary School Teacher Education Study Program (HMPS PGSD) at Nias University. The research uses a qualitative approach with a case study design. Data were collected through in-depth interviews with the election committee, HMPS chair candidates, and student voters, limited observation of the election process, and a study of documentation of the election based on the University of Nias' Integrated Academic Information System (SIMAT). Data analysis was conducted using an interactive analysis model that included data reduction, data presentation, and conclusion drawing, and was reinforced with source and method triangulation to maintain data validity. The results showed that the implementation of e-democracy through SIMAT increased the efficiency, transparency, and accessibility of student participation because voters could exercise their voting rights without being bound by space and time. However, the quality of student participation is still dominated by procedural and symbolic aspects, while deliberative involvement is relatively limited. The lack of interactive dialogue space, low digital democracy literacy, and the dominance of e-voting mechanisms mean that e-democracy is not yet optimal as a means of learning democracy.

Keywords: E-Democracy, Student Participation, Student Association Election, Campus Democracy, Teacher Education

Abstrak. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi *e-democracy* dan kualitas partisipasi mahasiswa dalam pemilihan Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) di Universitas Nias. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan panitia pemilihan, calon ketua HMPS, dan mahasiswa pemilih, observasi terbatas terhadap proses pemilihan, serta studi dokumentasi pelaksanaan pemilihan berbasis Sistem Informasi Akademik Terintegrasi (SIMAT) Universitas Nias. Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta diperkuat dengan triangulasi sumber dan metode untuk menjaga keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *e-democracy* melalui SIMAT meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas partisipasi mahasiswa karena pemilih dapat menggunakan hak pilih tanpa terikat ruang dan waktu. Namun, kualitas partisipasi mahasiswa masih didominasi oleh aspek prosedural dan simbolik, sementara keterlibatan deliberatif relatif terbatas. Minimnya ruang dialog interaktif, rendahnya literasi demokrasi digital, serta dominasi mekanisme *e-voting* menyebabkan *e-democracy* belum optimal sebagai sarana pembelajaran demokrasi.

Kata Kunci: E-Democracy, Partisipasi Mahasiswa, HMPS, Demokrasi Kampus, PGSD

How to Cite: Zai, E. P & Lase, I. W. (2026). Implementasi *E-Democracy* pada Tingkat Program Studi: Transformasi Praktik Demokrasi Mahasiswa dalam Pemilihan HMPS PGSD di Universitas Nias. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 7 (1), 1942-1953. <http://doi.org/10.54373/imeij.v7i1.5149>

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan sosial, termasuk praktik demokrasi. Digitalisasi tidak hanya memengaruhi proses administrasi dan komunikasi, tetapi juga mengubah cara individu dan kelompok berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik. Dalam konteks ini, konsep *e-democracy* muncul sebagai bentuk adaptasi demokrasi terhadap perkembangan teknologi informasi yang bertujuan memperluas partisipasi warga, meningkatkan efisiensi, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas proses demokratis (Coleman & Blumler, 2009; Macintosh, 2004). Namun, peningkatan akses melalui teknologi tidak secara otomatis menjamin kualitas partisipasi yang bermakna dalam praktik demokrasi.

Di lingkungan pendidikan tinggi, demokrasi tidak hanya diajarkan sebagai konsep normatif, tetapi juga dipraktikkan melalui organisasi kemahasiswaan. Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) menjadi ruang strategis bagi mahasiswa untuk belajar dan menginternalisasi nilai-nilai demokrasi seperti partisipasi, musyawarah, keterbukaan, dan legitimasi kepemimpinan. Pemilihan ketua HMPS merupakan arena penting karena melibatkan proses elektoral, kompetisi gagasan, serta keterlibatan aktif warga organisasi. Oleh karena itu, perubahan mekanisme pemilihan dari konvensional ke digital perlu dipahami sebagai transformasi praktik demokrasi, bukan sekadar perubahan teknis prosedural.

Penerapan *e-democracy* dalam pemilihan organisasi mahasiswa semakin menguat pascapandemi COVID-19, ketika keterbatasan interaksi tatap muka mendorong adopsi sistem pemilihan berbasis digital atau *e-voting*. Sistem ini dipandang lebih efisien dan adaptif, tetapi sekaligus memunculkan pertanyaan terkait kualitas partisipasi, kedalaman keterlibatan politik mahasiswa, dan legitimasi demokratis proses pemilihan. Sejumlah studi menunjukkan bahwa digitalisasi demokrasi memang dapat meningkatkan aksesibilitas, namun tidak selalu berbanding lurus dengan meningkatnya partisipasi substantif dan deliberatif (Chadwick, 2013; Dahlberg, 2011).

Dalam konteks Universitas Nias, penerapan *e-democracy* pada pemilihan Ketua HMPS PGSD tahun 2025 menjadi fenomena yang relevan untuk dikaji secara mendalam. Sebagai perguruan tinggi di wilayah kepulauan dengan keterbatasan infrastruktur dibandingkan kampus perkotaan, Universitas Nias menghadapi tantangan sekaligus peluang dalam mengimplementasikan demokrasi digital. Pemilihan berbasis *e-democracy* melalui SIMAT tidak hanya merepresentasikan upaya modernisasi tata kelola organisasi mahasiswa, tetapi juga mencerminkan proses adaptasi nilai-nilai demokrasi dalam konteks lokal dan institusional yang spesifik.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memahami *e-democracy* dari perspektif pengalaman dan pemaknaan mahasiswa, bukan semata-mata efektivitas teknis sistem. Demokrasi, sebagaimana ditegaskan oleh Dahl, tidak hanya diukur dari prosedur pemilihan, tetapi dari sejauh mana warga memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi secara bermakna dalam proses pengambilan keputusan (Dahl, 1998). Selain itu, teori partisipasi politik menekankan bahwa partisipasi mencakup keterlibatan aktif dalam seluruh tahapan pengambilan keputusan, bukan sekadar pemberian suara (Cohen & Uphoff, 1980). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mengisi celah kajian *e-democracy* di lingkungan pendidikan tinggi, khususnya pada level HMPS, serta memberikan kontribusi konseptual dan praktis bagi penguatan demokrasi kampus (Print, 2007).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan *e-democracy* dalam pemilihan Ketua HMPS PGSD Universitas Nias menghadirkan persoalan yang tidak hanya berkaitan dengan efisiensi teknis, tetapi juga menyangkut kualitas partisipasi, kedalaman keterlibatan demokratis, serta legitimasi proses pengambilan keputusan di kalangan mahasiswa. Terdapat ketegangan antara kemudahan akses yang ditawarkan sistem digital dan potensi berkurangnya ruang deliberasi serta partisipasi substantif mahasiswa. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana praktik *e-democracy* dijalankan dalam pemilihan Ketua HMPS PGSD Universitas Nias, bagaimana mahasiswa memaknai partisipasi politik dalam ruang digital, serta faktor-faktor yang memengaruhi kualitas demokrasi mahasiswa pada tingkat program studi. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika demokrasi digital di lingkungan pendidikan tinggi serta menjadi dasar perumusan praktik pemilihan organisasi mahasiswa yang lebih demokratis secara substantif.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memahami secara mendalam praktik dan dinamika implementasi *e-democracy* dalam pemilihan Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) di Universitas Nias. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada proses, pengalaman, serta makna partisipasi mahasiswa dalam konteks demokrasi digital, bukan pada pengukuran efektivitas secara kuantitatif (Creswell, 2014). Studi kasus digunakan karena penelitian menelaah satu peristiwa spesifik yang bersifat kontekstual, yakni pemilihan Ketua HMPS PGSD tahun 2025 yang dilaksanakan melalui Sistem Informasi Akademik Terintegrasi (SIMAT), di mana batas antara fenomena dan konteks institusional tidak dapat

dipisahkan secara tegas (Yin, 2018). Penelitian dilaksanakan di Program Studi PGSD Universitas Nias dengan fokus waktu pada rangkaian tahapan pemilihan Ketua HMPS. Informan penelitian ditentukan secara *purposive* berdasarkan keterlibatan langsung dalam proses pemilihan, terdiri atas 3 orang panitia pemilihan, 2 orang calon Ketua HMPS, dan 10 orang mahasiswa PGSD sebagai pemilih dari semester II, IV, dan VI. Jumlah informan dinilai telah memenuhi kecukupan data karena informasi yang diperoleh menunjukkan pola yang berulang.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur, dokumentasi, dan observasi terbatas. Wawancara digunakan untuk menggali pengalaman dan persepsi informan terkait pelaksanaan *e-democracy*, kualitas partisipasi, serta dampaknya terhadap praktik demokrasi HMPS (Kvale & Brinkmann, 2009). Dokumentasi meliputi pedoman pemilihan, pengumuman resmi, hasil rekapitulasi pemungutan suara di SIMAT, serta materi sosialisasi melalui media sosial HMPS dan Program Studi PGSD (Bowen, 2009). Observasi terbatas dilakukan secara non-partisipatif pada saat pemungutan suara daring untuk memahami proses pelaksanaan *e-voting*. Analisis data dilakukan secara simultan menggunakan model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles et al., 2014). Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik dengan membandingkan data hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi guna meningkatkan kredibilitas temuan penelitian (Lincoln & Guba, 1985).

HASIL

Gambaran Umum Partisipasi Mahasiswa dalam Pemilihan HMPS

Jumlah mahasiswa aktif Program Studi PGSD Universitas Nias yang menjadi pemilih dalam pemilihan Ketua HMPS tahun 2025 terdiri dari tiga angkatan, yaitu mahasiswa Semester II sebanyak 258 orang, Semester IV sebanyak 228 orang, dan Semester VI sebanyak 234 orang. Dengan demikian, total mahasiswa PGSD yang memiliki hak pilih berjumlah 720 orang. Berdasarkan dokumentasi panitia dan data rekapitulasi pada SIMAT, mayoritas mahasiswa tercatat telah mengakses sistem pemilihan pada tanggal 28 Agustus 2025. Panitia pemilihan menyampaikan bahwa penggunaan SIMAT memungkinkan mahasiswa dari berbagai lokasi untuk berpartisipasi tanpa harus hadir secara fisik di kampus. Kondisi ini dinilai sangat membantu, mengingat sebagian mahasiswa berada di luar kampus atau memiliki keterbatasan waktu.

Meskipun secara kuantitatif mayoritas mahasiswa tercatat menggunakan hak pilih melalui SIMAT, hasil wawancara menunjukkan bahwa partisipasi tersebut tidak selalu disertai dengan pemahaman substantif terhadap proses pemilihan. Seorang mahasiswa Semester II menyatakan “Saya memilih karena gampang dan cepat. Soal visi misi, saya lihat sekilas saja.” Pernyataan ini mengindikasikan bahwa e-democracy lebih dimaknai sebagai kemudahan teknis, bukan sebagai ruang refleksi politik. Mahasiswa Semester VI menunjukkan sikap yang lebih reflektif, namun tetap mengkritisi minimnya ruang diskusi. Mereka menyatakan “Kalau dulu ada kampanye langsung, kita bisa tanya. Sekarang cuma baca, jadi rasanya kurang hidup.”

Namun demikian, hasil wawancara dengan mahasiswa menunjukkan bahwa keterlibatan mereka dalam pemilihan tidak selalu mencerminkan partisipasi demokratis yang mendalam. Sebagian mahasiswa menyatakan bahwa mereka memilih karena “mudah dan cepat”, sementara sebagian lainnya mengaku memilih hanya untuk memenuhi kewajiban sebagai mahasiswa, tanpa mengikuti secara utuh proses sosialisasi dan penyampaian visi misi calon.

Implementasi *E-democracy* melalui SIMAT

Implementasi *e-democracy* dalam pemilihan Ketua HMPS PGSD dilaksanakan secara terintegrasi melalui SIMAT (Sistem Informasi Akademik Terintegrasi Universitas Nias). Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi, SIMAT digunakan sebagai platform utama untuk pendaftaran calon, pengumuman tahapan pemilihan, penyampaian informasi calon, serta pemungutan suara. Panitia pemilihan menjelaskan bahwa penggunaan SIMAT dipilih karena sistem ini telah dikenal oleh mahasiswa sebagai sarana layanan akademik, sehingga dianggap memudahkan proses adaptasi. Seluruh tahapan pemilihan disusun secara kronologis dan diumumkan melalui SIMAT serta diperkuat melalui media sosial HMPS dan Program Studi PGSD.

Dari hasil wawancara dengan panitia, terungkap bahwa pelaksanaan pemilihan melalui SIMAT dinilai lebih tertib dibandingkan dengan pemilihan konvensional sebelumnya. Panitia tidak lagi menghadapi persoalan teknis seperti pencetakan surat suara, penyediaan kotak suara, maupun penghitungan manual. Selain itu, hasil pemilihan dapat diketahui secara cepat setelah proses pemungutan suara ditutup. Meskipun demikian, beberapa mahasiswa menyampaikan bahwa sistem SIMAT lebih berfungsi sebagai alat teknis pemungutan suara, belum sepenuhnya menjadi ruang demokrasi digital yang mendorong interaksi, dialog, dan diskusi politik antar mahasiswa. SIMAT berfungsi efektif sebagai alat administratif pemilihan, tetapi belum berkembang menjadi ruang demokrasi digital yang deliberatif. Seorang panitia pemilihan menjelaskan “Dari sisi teknis sangat membantu, tapi memang tidak ada fitur diskusi atau

debat.” Hal ini menunjukkan bahwa desain sistem lebih berorientasi pada efisiensi prosedural dibandingkan kualitas partisipasi.

Sosialisasi dan Akses Informasi Pemilihan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi pemilihan Ketua HMPS PGSD dilakukan melalui dua saluran utama, yaitu SIMAT dan akun media sosial HMPS serta Program Studi PGSD. Informasi terkait jadwal pendaftaran (1–9 Agustus 2025), penetapan calon (13 Agustus 2025), penyampaian visi misi (20 Agustus 2025), masa tenang (21–27 Agustus 2025), dan pemilihan (28 Agustus 2025) dipublikasikan secara berulang melalui kedua saluran tersebut. Mahasiswa Semester II cenderung mengakses informasi melalui media sosial, terutama karena intensitas penggunaan media sosial yang tinggi. Sementara itu, mahasiswa Semester IV dan VI lebih sering mengakses SIMAT untuk memperoleh informasi resmi. Perbedaan pola akses ini menunjukkan bahwa e-democracy di tingkat program studi masih sangat dipengaruhi oleh karakteristik generasi dan kebiasaan digital mahasiswa.

Penyampaian Visi dan Misi Calon Ketua HMPS

Tahap penyampaian visi dan misi calon Ketua HMPS PGSD dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2025 melalui unggahan dokumen dan informasi pada SIMAT serta media sosial HMPS. Dari hasil dokumentasi, seluruh calon telah menyampaikan visi dan misi secara tertulis. Namun, hasil wawancara dengan mahasiswa menunjukkan bahwa penyampaian visi dan misi secara daring belum sepenuhnya menarik perhatian pemilih. Sebagian mahasiswa mengaku tidak membaca secara lengkap visi dan misi calon, melainkan hanya melihat sekilas atau bahkan langsung memilih berdasarkan rekomendasi teman. Calon Ketua HMPS yang diwawancarai menyampaikan bahwa keterbatasan ruang interaksi menjadi tantangan utama dalam sistem e-democracy. Tidak adanya forum debat atau dialog langsung membuat proses kampanye terasa “dingin” dan kurang dinamis. Hal ini berdampak pada minimnya diskursus kritis di kalangan mahasiswa terkait gagasan dan program calon.

Pemaknaan Mahasiswa terhadap E-democracy

Hasil penelitian menunjukkan adanya variasi pemaknaan mahasiswa terhadap *e-democracy*. Sebagian mahasiswa memaknai *e-democracy* sebagai bentuk kemajuan dan modernisasi organisasi mahasiswa. Mereka menilai sistem digital mempermudah proses pemilihan, menghemat waktu, dan mengurangi potensi konflik. Namun, sebagian mahasiswa lainnya memaknai *e-democracy* secara lebih kritis. Mereka mengungkapkan bahwa

kemudahan memilih secara daring justru membuat proses pemilihan terasa “biasa saja” dan kurang memiliki nilai simbolik. Beberapa mahasiswa Semester VI bahkan membandingkan pemilihan daring dengan pemilihan konvensional sebelumnya yang dianggap lebih meriah dan partisipatif.

Pemaknaan ini menunjukkan bahwa *e-democracy* tidak hanya dipahami sebagai mekanisme teknis, tetapi juga sebagai praktik sosial yang memengaruhi rasa memiliki (*sense of belonging*) mahasiswa terhadap organisasi. Selain dari pada itu, mahasiswa juga memaknai *e-democracy* secara beragam. Sebagian melihatnya sebagai simbol modernisasi organisasi, sementara yang lain menilai bahwa sistem daring mengurangi nilai simbolik pemilihan. Seorang mahasiswa menyatakan “Pemilihannya seperti mengisi KRS, jadi terasa biasa saja.” Pemaknaan ini menegaskan bahwa *e-democracy* memengaruhi relasi emosional mahasiswa dengan organisasi.

Dinamika Partisipasi Mahasiswa

Dari hasil wawancara dan observasi, partisipasi mahasiswa dalam pemilihan Ketua HMPS PGSD dapat dikategorikan ke dalam beberapa bentuk. Pertama, partisipasi aktif, yaitu mahasiswa yang mengikuti seluruh tahapan pemilihan, membaca visi misi calon, dan memberikan suara secara sadar. Kedua, partisipasi pasif, yaitu mahasiswa yang memilih tanpa keterlibatan emosional atau pemahaman mendalam. Ketiga, partisipasi simbolik, yaitu mahasiswa yang memilih hanya karena adanya kewajiban atau dorongan sosial. Mahasiswa Semester II cenderung berada pada kategori partisipasi simbolik, sementara mahasiswa Semester IV dan VI menunjukkan kecenderungan partisipasi yang lebih reflektif, meskipun tidak selalu aktif dalam diskusi politik. Temuan ini menunjukkan bahwa *e-democracy* di tingkat program studi belum sepenuhnya mampu mendorong partisipasi deliberatif.

Tantangan Implementasi E-democracy

Hasil penelitian juga mengidentifikasi sejumlah tantangan dalam implementasi *e-democracy*. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan interaksi, rendahnya literasi demokrasi digital, serta kecenderungan mahasiswa memandang pemilihan sebagai prosedur administratif semata. Selain itu, ketergantungan pada sistem digital juga memunculkan persoalan teknis, seperti keterbatasan akses internet bagi sebagian mahasiswa. Panitia pemilihan mengakui bahwa meskipun sistem berjalan lancar, upaya untuk membangun kualitas demokrasi mahasiswa masih memerlukan inovasi lebih lanjut, terutama dalam menciptakan ruang dialog dan pendidikan politik mahasiswa.

DISKUSI

Implementasi *E-democracy* sebagai Transformasi Demokrasi Kampus

Secara konseptual, *e-democracy* dipahami sebagai pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk memperluas, memperdalam, dan mempermudah praktik demokrasi (Chadwick, 2006; Macintosh, 2004). Temuan penelitian menunjukkan bahwa penggunaan SIMAT dalam pemilihan Ketua HMPS PGSD Universitas Nias telah merepresentasikan bentuk transformasi demokrasi kampus dari model konvensional menuju model digital. Transformasi ini terutama tampak pada efisiensi prosedural, transparansi hasil, serta kemudahan akses bagi pemilih. Hal ini sejalan dengan pandangan Coleman dan Blumler yang menyatakan bahwa *e-democracy* mampu mereduksi hambatan partisipasi seperti jarak, waktu, dan biaya. Dalam konteks Universitas Nias, *e-democracy* melalui SIMAT memungkinkan mahasiswa dari berbagai angkatan dan lokasi untuk menggunakan hak pilihnya tanpa harus hadir secara fisik (Coleman & Blumler, 2009).

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa transformasi yang terjadi masih dominan pada aspek teknis-administratif. *E-democracy* lebih dimaknai sebagai digitalisasi prosedur pemungutan suara, bukan sebagai ekosistem demokrasi digital yang mendorong dialog, deliberasi, dan pertukaran gagasan secara kritis. Kondisi ini menguatkan kritik dalam literatur *e-democracy* yang menyatakan bahwa penggunaan teknologi tidak secara otomatis meningkatkan kualitas demokrasi apabila tidak disertai desain partisipasi yang *deliberative* (Dahlberg, 2011).

Partisipasi Mahasiswa dalam Perspektif Teori Partisipasi Politik

Partisipasi mahasiswa dalam pemilihan Ketua HMPS PGSD menunjukkan variasi tingkat keterlibatan, mulai dari partisipasi aktif, pasif, hingga simbolik. Temuan ini dapat dianalisis menggunakan teori partisipasi politik yang dikemukakan oleh Verba, Scholzman, dan Brady, yang membedakan partisipasi berdasarkan intensitas, kesadaran, dan motivasi individu (Verba et al., 1995). Mahasiswa yang mengikuti seluruh tahapan pemilihan, memahami visi misi calon, dan memberikan suara secara sadar dapat dikategorikan sebagai partisipan aktif. Kelompok ini relatif kecil, namun menunjukkan potensi berkembangnya budaya demokrasi yang reflektif. Sebaliknya, mayoritas mahasiswa cenderung berada pada kategori partisipasi pasif dan simbolik, di mana memilih dilakukan semata karena kemudahan sistem atau dorongan normatif sebagai mahasiswa.

Fenomena ini menunjukkan bahwa *e-democracy* memang berhasil meningkatkan kuantitas partisipasi, tetapi belum sepenuhnya meningkatkan kualitas partisipasi. Temuan ini sejalan

dengan Norris yang menyatakan bahwa teknologi digital cenderung memperluas akses partisipasi, namun tidak selalu meningkatkan keterlibatan politik yang substantif (Norris, 2001). Dalam konteks ini, *e-democracy* di lingkungan HMPS PGSD Universitas Nias masih berada pada tahap partisipasi prosedural, belum mencapai partisipasi deliberatif.

***E-democracy* dan Demokrasi Deliberatif di Lingkungan Kampus**

Demokrasi deliberatif menekankan pentingnya diskusi rasional, pertukaran argumen, dan pembentukan opini publik melalui dialog (Habermas, 1996). Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme *e-democracy* yang diterapkan belum menyediakan ruang deliberasi yang memadai. Penyampaian visi dan misi calon dilakukan secara satu arah melalui SIMAT dan media sosial, tanpa adanya forum dialog interaktif seperti debat daring, diskusi terbuka, atau tanya jawab antara calon dan pemilih. Keterbatasan ini berdampak pada rendahnya kualitas diskursus politik mahasiswa. Sebagian besar pemilih tidak memiliki kesempatan untuk menguji gagasan calon secara kritis, sehingga pilihan politik sering kali didasarkan pada kedekatan personal atau rekomendasi teman. Kondisi ini menunjukkan bahwa *e-democracy* yang diterapkan lebih mendekati model *e-voting*, bukan *e-deliberation*.

Padahal, dalam konteks pendidikan tinggi, organisasi mahasiswa seharusnya menjadi laboratorium demokrasi yang menumbuhkan keterampilan berpikir kritis, argumentasi, dan pengambilan keputusan kolektif. Tanpa dimensi deliberatif, *e-democracy* berpotensi mereduksi demokrasi menjadi sekadar rutinitas administratif, sebagaimana diungkapkan oleh mahasiswa dalam hasil penelitian.

Literasi Demokrasi Digital Mahasiswa

Temuan penelitian juga mengindikasikan bahwa literasi demokrasi digital mahasiswa masih relatif rendah. Meskipun mahasiswa memiliki kemampuan teknis menggunakan sistem digital, pemahaman mereka terhadap nilai-nilai demokrasi, seperti tanggung jawab memilih, evaluasi program calon, dan makna kepemimpinan organisasi, belum berkembang secara optimal. Hal ini memperkuat pandangan Buckingham bahwa literasi digital tidak hanya mencakup kemampuan teknis, tetapi juga kemampuan kritis dan etis dalam menggunakan teknologi (Buckingham, 2007). Dalam konteks *e-democracy* HMPS PGSD Universitas Nias, literasi digital mahasiswa masih berorientasi pada penggunaan sistem, bukan pada pemanfaatannya untuk memperkuat praktik demokrasi yang substantif. Rendahnya literasi demokrasi digital ini berimplikasi pada pemaknaan *e-democracy* yang cenderung pragmatis. Mahasiswa memaknai *e-democracy* sebagai cara cepat dan mudah untuk memilih, bukan

sebagai ruang pembelajaran politik. Kondisi ini menjadi tantangan serius bagi pengembangan demokrasi kampus yang berkelanjutan.

Dinamika Generasi dan Pola Partisipasi Digital

Perbedaan pola partisipasi antara mahasiswa Semester II, IV, dan VI menunjukkan adanya dinamika generasi dalam praktik *e-democracy*. Mahasiswa semester awal cenderung lebih responsif terhadap media sosial, namun partisipasinya bersifat simbolik. Sementara itu, mahasiswa semester atas menunjukkan kecenderungan partisipasi yang lebih reflektif, meskipun tidak selalu aktif dalam diskusi. Temuan ini sejalan dengan teori generasi digital (Prensky, 2001) yang menyatakan bahwa generasi muda memiliki kedekatan dengan teknologi, namun kedekatan tersebut tidak selalu berbanding lurus dengan kedalaman keterlibatan. Oleh karena itu, desain *e-democracy* perlu mempertimbangkan karakteristik generasi mahasiswa agar partisipasi tidak hanya luas, tetapi juga bermakna.

Implikasi terhadap Penguatan Budaya Demokrasi Kampus

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *e-democracy* dalam pemilihan Ketua HMPS PGSD Universitas Nias memiliki potensi besar sebagai instrumen penguatan budaya demokrasi kampus. Transparansi proses, efisiensi waktu, dan kemudahan akses merupakan modal penting untuk membangun kepercayaan mahasiswa terhadap sistem organisasi. Namun, tanpa upaya sistematis untuk meningkatkan kualitas partisipasi, *e-democracy* berisiko menjadi prosedur formalitas yang miskin makna edukatif. Oleh karena itu, *e-democracy* perlu diposisikan tidak hanya sebagai alat teknis, tetapi sebagai strategi pedagogis untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi, kepemimpinan, dan tanggung jawab sosial mahasiswa. Integrasi *e-democracy* dengan pendidikan kewarganegaraan kampus, pelatihan literasi demokrasi digital, serta pengembangan ruang deliberasi daring menjadi langkah strategis yang perlu dipertimbangkan oleh pengelola program studi dan universitas.

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, dapat ditegaskan bahwa implementasi *e-democracy* dalam pemilihan Ketua HMPS PGSD Universitas Nias telah berhasil meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas partisipasi mahasiswa. Namun, keberhasilan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kualitas partisipasi dan kedalaman demokrasi. *E-democracy* yang diterapkan masih berada pada tahap prosedural, dengan dominasi *e-voting* dan minimnya ruang deliberatif. Tantangan utama terletak pada literasi demokrasi digital mahasiswa dan desain sistem yang belum mengakomodasi dialog politik yang kritis. Dengan

demikian, *e-democracy* di lingkungan kampus memerlukan penguatan konseptual dan praksis agar benar-benar berfungsi sebagai wahana pendidikan demokrasi bagi mahasiswa

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi *e-democracy* dalam pemilihan Ketua HMPS PGSD Universitas Nias melalui SIMAT efektif meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas partisipasi mahasiswa. Namun, peningkatan tersebut lebih bersifat prosedural dan belum diikuti oleh penguatan kualitas partisipasi demokratis yang deliberatif. Secara teoretis, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa *e-democracy* di tingkat program studi cenderung mereproduksi model partisipasi prosedural apabila tidak disertai desain dialogis dan literasi demokrasi digital. Secara praktis, hasil penelitian menegaskan perlunya pengembangan *e-democracy* kampus sebagai ekosistem pembelajaran demokrasi melalui forum diskusi daring, debat calon, dan integrasi pendidikan kewarganegaraan mahasiswa.

REKOMENDASI

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup kasus yang terbatas pada satu program studi, sehingga temuan tidak dimaksudkan untuk generalisasi luas. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi komparatif antar program studi atau menggunakan pendekatan *mixed methods* guna memperkaya analisis partisipasi mahasiswa dalam *e-democracy* kampus.

REFERENSI

- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40.
- Buckingham, D. (2007). Digital media literacies: Rethinking media education in the age of the internet. *Research in Comparative and International Education*, 2(1), 43–55.
- Chadwick, A. (2006). *Internet politics: States, citizens, and new communication technologies*. Oxford University Press.
- Chadwick, A. (2013). *The hybrid media system: Politics and power*. Oxford University Press.
- Cohen, J. M. , & Uphoff, N. T. (1980). Participation's place in rural development: Seeking clarity through specificity . *World Development*, 8(3), 213–235.
- Coleman, S. , & Blumler, J. G. (2009). *The Internet and democratic citizenship: Theory, practice and policy*. Cambridge University Press.
- Coleman, S. , & Shane, P. M. (2012). *Connecting democracy: Online consultation and the flow of political communication*. MIT Press.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.)*. Sage Publications.
- Dahl, R. A. (1998). *On democracy*. Yale University Press.

- Dahlberg, L. (2011). Re-constructing digital democracy: An outline of four 'positions.' *New Media & Society*, 13(6), 855–872.
- Habermas, J. (1996). *Between facts and norms: Contributions to a discourse theory of law and democracy*. MIT Press.
- Krimmer, R. , Volkamer, M. , & Grimm, R. (2016). *E-voting: A survey and evaluation of electronic voting systems*. In A. K. Wright (Ed.). Springer.
- Kvale, S. , & Brinkmann, S. (2009). *InterViews: Learning the craft of qualitative research interviewing*. Sage Publications.
- Lincoln, Y. S. , & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. Sage Publications.
- Macintosh, A. (2004). Characterizing e-participation in policy-making. *Proceedings of the 37th Annual Hawaii International Conference on System Sciences*.
- Miles, M. B. , Huberman, A. M. , & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.)*. Sage Publications.
- Norris, P. (2001). *Digital divide: Civic engagement, information poverty, and the internet worldwide* . Cambridge University Press.
- Prensky, M. (2001). Digital natives, digital immigrants. *On the Horizon*, 9(5), 1–6.
- Print, M. (2007). Citizenship education and youth participation in democracy. *British Journal of Educational Studies*, 55(3), 325–345.
- Stake, R. E. (1995). *The art of case study research*. Sage Publications.
- Verba, S. , Schlozman, K. L. , & Brady, H. E. (1995). *Voice and equality: Civic voluntarism in American politics*. Harvard University Press.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods (6th ed.)* . Sage Publications.